

STATISTIK PENDIDIKAN KABUPATEN WAKATOBI 2016



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WAKATOBI**

STATISTIK PENDIDIKAN KABUPATEN WAKATOBI

2016



Statistik Pendidikan Kabupaten Wakatobi 2016

Nomor ISBN : -
Nomor Publikasi : 74070.1714
Katalog BPS : 4301002.7407

Ukuran Buku : 17.6 x 25 cm
Jumlah Halaman : x + 51 halaman

Naskah
BPS Kabupaten Wakatobi

Penyunting
BPS Kabupaten Wakatobi

Gambar Kulit
BPS Kabupaten Wakatobi

Diterbitkan oleh
© Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi

Dicetak oleh

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Kata Pengantar

Publikasi Statistik Pendidikan Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 merupakan publikasi pertama terkait statistik pendidikan yang rencananya akan diterbitkan oleh BPS Kabupaten Wakatobi secara tahunan di periode mendatang. Publikasi ini memuat berbagai informasi umum terkait kondisi dan refleksi perkembangan pembangunan di bidang pendidikan di Kabupaten Wakatobi, yaitu menyangkut masalah Angka Melek Huruf (AMH), pendidikan anak usia dini, rasio murid-guru, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, tingkat pendidikan, sampai dengan akses teknologi informasi di tingkat wilayah Kabupaten Wakatobi. Data-data pokok yang digunakan sebagian besar bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diolah BPS Kabupaten Wakatobi serta data-data lain yang relevan untuk dijadikan sebagai bahan penunjang analisis.

Kami menyadari meskipun telah diupayakan secara maksimal, akan tetapi publikasi ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan publikasi yang akan datang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terbitnya publikasi ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wangi-wangi, Oktober 2017
Badan Pusat Statistik
Kabupaten Wakatobi
Kepala,



Ade Ida Mane, S.ST, M.Si

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Grafik.....	ix
Ringkasan.....	1
Pendahuluan.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sumber Data.....	4
Istilah Teknis.....	5
Kondisi Pendidikan Kabupaten Wakatobi Tahun 2016.....	11
3.1 Angka Melek Huruf.....	11
3.2 Pendidikan Anak Usia Dini.....	13
3.3 Rasio Murid-Guru.....	15
3.4 Partisipasi Sekolah.....	17
3.5 Rata-rata Lama Sekolah.....	21
3.6 Harapan Lama Sekolah.....	23
3.7 Tingkat Pendidikan.....	24
3.8 Akses Teknologi Informasi.....	27

Daftar Tabel

No	Judul Tabel	Hal
1	Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru Dirinci Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaen Wakatobi, 2016	16
2	Rasio Murid-Sekolah dan Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Wakatobi, 2016	17
3	Umur Standar di Setiap Jenjang Pendidikan	19
4	Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Dirinci Menurut Status Bersekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (persen), 2016	25
5	Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas Dirinci Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (persen), 2016	26
L1	Jumlah Sekolah di Lingkungan Depdikbud menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan, 2016	33
L2	Jumlah Murid di Lingkungan Depdikbud menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan, 2016	33
L3	Jumlah Guru di Lingkungan Depdikbud menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan, 2016	34
L4	Jumlah Sekolah di Luar Lingkungan Depdikbud menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan, 2016	34
L5	Jumlah Murid di Luar Lingkungan Depdikbud menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan, 2016	35
L6	Jumlah Guru di Luar Lingkungan Depdikbud menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan, 2016	35
L7	Jumlah Sekolah Setingkat Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2016	36
L8	Jumlah Sekolah Setingkat Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2016	36
L9	Jumlah Sekolah Setingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2016	37
L10	Jumlah Sekolah Setingkat Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2016	37

L11	Jumlah Murid Setingkat Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2016	38
L12	Jumlah Murid Setingkat Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2016	38
L13	Jumlah Murid Setingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2016	39
L14	Jumlah Murid Setingkat Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2016	39
L15	Jumlah Guru Setingkat Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2016	40
L16	Jumlah Guru Setingkat Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2016	40
L17	Jumlah Guru Setingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2016	41
L18	Jumlah Guru Setingkat Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2016	41
L19	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Binongko, 2016	42
L20	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Togo Binongko, 2016	43
L21	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Tomia, 2016	44
L22	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Tomia Timur, 2016	45
L23	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Kaledupa, 2016	46
L24	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Kaledupa Selatan, 2016	47

L25	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Wangi-Wangi, 2016	48
L26	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 2016	49
L27	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kabupaten Wakatobi, 2016	50
L28	Jumlah Alumni di Perguruan Tinggi menurut Lembaga Pendidikan di Wakatobi, TA 2016/2017	51
L29	Jumlah Dosen Pengajar pada Perguruan Tinggi menurut Lembaga Pendidikan di Wakatobi, TA 2016/2017	51
L30	Jumlah Mahasiswa Terdaftar pada Perguruan Tinggi menurut Lembaga Pendidikan di Wakatobi, TA 2016/2017	51

<https://wakatobikab.bps.go.id>

Daftar Grafik

No	Judul Grafik	Hal
1	Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Dirinci Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi, 2016	12
2	Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Dirinci Menurut Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Wakatobi, 2016	12
3	Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Dirinci Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Wakatobi, 2016	13
4	Persentase Anak Umur 0-6 Tahun yang Sedang dan Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah Dirinci Menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal, 2016	14
5	Angka Partisipasi Sekolah Dirinci Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi, 2016	18
6	Angka Partisipasi Kasar Dirinci Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (persen), 2016	20
7	Angka Partisipasi Murni Dirinci Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (persen), 2016	21
8	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Wakatobi dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2010-2016	22
9	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Wakatobi dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2010-2016	23
10	Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Tidak/Belum Pernah Bersekolah Dirinci Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Wakatobi (persen), 2016	24
11	Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas Dirinci Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (persen), 2016	26
12	Persentase Penduduk Umur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet Dirinci Menurut Media Mengakses Internet di Kabupaten Wakatobi, 2016	28
13	Persentase Penduduk Umur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet Dirinci Menurut Lokasi Mengakses Internet di Kabupaten Wakatobi, 2016	29
14	Persentase Pengguna Internet Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Wakatobi, 2016	29

Ringkasan

1. Pada tahun 2016, terjadi peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) di Wakatobi bila dibandingkan dengan tahun 2015. AMH meningkat dari 90.22 persen menjadi 92.83 persen.
2. AMH penduduk laki-laki mencapai 96.71 persen, lebih tinggi daripada AMH penduduk perempuan yang mencapai 89.43 persen. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, AMH penduduk umur 15 tahun ke atas di perdesaan (93.20 persen) menunjukkan nilai lebih tinggi dibanding AMH di perkotaan (90.27 persen).
3. Pada tahun 2016, dari total penduduk Kabupaten Wakatobi umur 0-6 tahun, seperempatnya, yakni 27.10 persen masih/pernah mengikuti pendidikan prasekolah tahun ajaran 2015/2016, sedangkan yang pernah mengikuti pendidikan prasekolah tahun ajaran 2014/2015 atau ajaran sebelumnya sekitar 10.34 persen.
4. Rasio murid-guru di Kabupaten Wakatobi sudah cukup baik. Untuk TK Sederajat rasio murid-guru sekitar 8.6; SD Sederajat rasio murid-guru sekitar 11.31; sedangkan rasio murid-guru untuk SMP Sederajat sekitar 8.69; dan rasio murid-guru untuk SMA Sederajat sekitar 9.09.
5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) umur 7-12 tahun mencapai 98.27 persen, APS umur 13-15 tahun 97.14 persen, sedangkan APS umur 16-18 tahun hanya sebesar 76.15 persen, dan APS umur 19-24 tahun adalah sebesar 21.74 persen.
6. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD mencapai 110.07. APK terus menurun pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi. Adapun APK pada jenjang SMP adalah 99.06, pada jenjang SMA sebesar 69.74, dan pada jenjang diploma ke atas adalah sebesar 30.80.
7. Untuk jenjang SD (7-12 tahun) Angka Partisipasi Murni (APM) pada Tahun 2015 sekitar 95.29 persen. APM SMP (13-15 tahun) mencapai angka 77.99 persen, APM SMA (16-18 tahun) hanya mencapai 53.08 persen, dan APM untuk jenjang Diploma ke atas hanya mencapai angka 13.97 persen.

8. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Wakatobi di tahun 2016 adalah 7.7 tahun. Ada tahun yang sama harapan penduduk Kabupaten Wakatobi yang berumur 7 tahun ke atas mengenyam bangku sekolah selama 12.87 tahun.
9. Pada tahun 2016, penduduk Wakatobi berumur 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah bersekolah sekitar 6.21 persen, dan yang tidak/belum menamatkan pendidikannya di bangku sekolah dasar relatif besar yaitu 20.52 persen. Sementara yang berhasil menamatkan pendidikannya sampai SD mencapai 35.63 persen.
10. Pada tahun 2016, penggunaan telepon selular meningkat 1.56 persen dibanding tahun 2015 menjadi 59.24 persen. Pengguna telepon selular masih didominasi oleh penduduk yang tinggal di perdesaan yaitu sebesar 66.99 persen sedangkan di perdesaan sebesar 58.06 persen.
11. Peningkatan pengguna telepon selular sebanding dengan peningkatan pengguna internet. Pada tahun 2016, secara umum terjadi peningkatan sebesar 3.07 persen terhadap penduduk umur 5 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir dari waktu pencacahan, dari 15.53 persen di tahun sebelumnya menjadi 18.60 persen.
12. Pada tahun 2016, dari seluruh pengguna internet umur 5 tahun ke atas, sekitar 95.92 persen mengakses melalui media HP.
13. Rumah tangga yang mempunyai akses terhadap komputer/laptop pada tahun 2016 hanya mencapai 19.32 persen. Pengguna komputer/laptop di daerah perkotaan mencapai 37.42 persen, sedangkan di perdesaan pengguna komputer/laptop hanya berkisar 19 persen.

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia. Oleh sebab itu maka setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C, ayat 1 dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat 2 dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warga negara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan

pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Berangkat dari kesadaran pentingnya indikator-indikator pendidikan guna mendapatkan gambaran atau kondisi dan pencapaian di bidang pendidikan di Kabupaten Wakatobi, Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi menyusun publikasi berjudul **"Statistik Pendidikan Kabupaten Wakatobi 2016"**.

Publikasi ini menampilkan indikator-indikator umum pendidikan dan perbandingan kondisi pada tahun 2016 dengan tahun sebelumnya. Beberapa istilah yang digunakan juga ditampilkan guna membantu para pengguna data dalam menginterpretasikan dan melakukan analisis atas informasi yang disajikan.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam publikasi Statistik Pendidikan ini adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Wakatobi dan sarana pendidikan yang tersedia di Kabupaten Wakatobi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Diterbitkannya publikasi ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan data dasar bidang pendidikan di Kabupaten Wakatobi bagi seluruh pengguna data baik pemerintah maupun swasta.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyajian publikasi ini yaitu:

1. Memberikan gambaran kondisi dan pencapaian bidang pendidikan lebih rinci menurut aspek jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan daerah tempat tinggal.
2. Penyediaan indikator utama di bidang pendidikan, serta
3. Menjadi informasi awal bagi pihak pemerintah dan swasta dalam menyusun kebijakan dan strategi di bidang pendidikan.

1.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk data agregat dan komposisi penduduk diperoleh dari proyeksi penduduk;
2. Untuk indikator-indikator pendidikan diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016;
3. Data jumlah sarana pendidikan dan pendukungnya didapat dari data sekunder yang dikumpulkan dari instansi terkait, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi.

Istilah Teknis

Daerah perkotaan adalah suatu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan yang memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya.

Daerah perdesaan adalah suatu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan yang belum memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya.

Penduduk ialah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia maupun warga negara asing yang berdomisili di dalam wilayah Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.

Angka Melek Huruf (AMH) ialah perbandingan antara jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis/melek huruf dan jumlah seluruh penduduk umur 15 tahun ke atas di suatu negara atau daerah.

Rumus:

$$AMH_{15+}^t = \frac{MH_{15+}^t}{P_{15+}^t} \times 100$$

$$ABH_{15+}^t = \frac{BH_{15+}^t}{P_{15+}^t} \times 100$$

Keterangan:

- AMH_{15+}^t : Angka Melek Huruf penduduk umur 15 tahun ke atas pada tahun t
- ABH_{15+}^t : Angka Buta Huruf penduduk umur 15 tahun ke atas pada tahun t
- MH_{15+}^t : Jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas pada tahun t yang melek huruf
- BH_{15+}^t : Jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas pada tahun t yang buta huruf

P_{15+}^t : Jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas pada tahun t

Manfaat:

Untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut terhadap penduduk pada kelompok umur tertentu.

Rumus:

$$APK_{SD} = \frac{P_{SD}}{P_{7-12}} \times 100\%$$

$$APK_{SMP} = \frac{P_{SMP}}{P_{13-15}} \times 100\%$$

$$APK_{SMA} = \frac{P_{SMA}}{P_{16-18}} \times 100\%$$

Keterangan:

P_{SD} : Jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SD atau sederajat

P_{7-12} : Jumlah penduduk berumur 7-12 tahun

P_{SMP} : Jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SMP atau sederajat

P_{13-15} : Jumlah penduduk berumur 13-15 tahun

P_{SMA} : Jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SMA atau sederajat

P_{16-18} : Jumlah penduduk berumur 16-18 tahun

Manfaat:

Untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap seluruh anak pada kelompok umur tersebut.

Rumus:

$$APM_{SD} = \frac{P_{7-12(SD)}}{P_{7-12}} \times 100\%$$

$$APM_{SMP} = \frac{P_{13-15(SMP)}}{P_{13-15}} \times 100\%$$

$$APM_{SMA} = \frac{P_{16-18(SMA)}}{P_{16-18}} \times 100\%$$

Keterangan:

- $P_{7-12(SD)}$: Jumlah penduduk berumur 7-12 tahun yang bersekolah pada jenjang SD atau sederajat
- P_{7-12} : Jumlah penduduk berumur 7-12 tahun
- $P_{13-15(SMP)}$: Jumlah penduduk berumur 13-15 tahun yang bersekolah pada jenjang SMP atau sederajat
- P_{13-15} : Jumlah penduduk berumur 13-15 tahun
- $P_{16-18(SMA)}$: Jumlah penduduk berumur 16-18 tahun yang bersekolah pada jenjang SMA atau sederajat
- P_{16-18} : Jumlah penduduk berumur 16-18 tahun

Manfaat:

Untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat batasan umur.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai.

Rumus:

$$APS_{7-12} = \frac{P_{7-12(Masih Sekolah)}}{P_{7-12}} \times 100\%$$

$$APS_{13-15} = \frac{P_{13-15(Masih Sekolah)}}{P_{13-15}} \times 100\%$$

$$APS_{16-18} = \frac{P_{16-18(Masih Sekolah)}}{P_{16-18}} \times 100\%$$

Keterangan:

- $P_{7-12(Masih Sekolah)}$: Jumlah penduduk berumur 7-12 tahun yang masih bersekolah
- P_{7-12} : Jumlah penduduk berumur 7-12 tahun
- $P_{13-15(Masih Sekolah)}$: Jumlah penduduk berumur 13-15 tahun yang masih bersekolah

P_{13-15}	: Jumlah penduduk berumur 13 -15 tahun
P_{16-18} (Masih Sekolah)	: Jumlah penduduk berumur 16-18 tahun yang masih bersekolah
P_{16-18}	: Jumlah penduduk berumur 16-18 tahun

Manfaat:

Untuk menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok umur tertentu.

Rata-rata Lama Sekolah (Mean Years of Schooling/MYS) merupakan jumlah tahun yang digunakan penduduk berumur 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

Rumus:

Rata-rata Lama Sekolah untuk yang partisipasi sekolahnya Masih Bersekolah dan Tidak Bersekolah Lagi namun "Tidak Tamat":

$$\text{MYS} = \text{Tahun Konversi} + \text{Kelas Tertinggi yang pernah diduduki} - 1$$

Rata-rata Lama Sekolah untuk yang partisipasi sekolahnya Tidak Bersekolah Lagi dan "Sudah Tamat":

$$\text{MYS} = \text{Tahun Konversi} + \text{Kelas Tertinggi yang pernah diduduki}$$

Adapun Tahun Konversi dari Pendidikan yang Ditamatkan adalah:

SD sederajat	: 6 tahun
SMP sederajat	: 9 tahun
SMA sederajat	: 12 tahun
Diploma I	: 13 tahun
Diploma II	: 14 tahun
Akademi/Diploma III	: 15 tahun
Sarjana/Diploma IV	: 16 tahun
Pasca Sarjana/S2	: 18 tahun
Doktor/S3	: 21 tahun

Manfaat:

Untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.

Harapan Lama Sekolah (Expected Years of Schooling/EYS) adalah rata-rata lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Rumus:

$$HLS_{\alpha}^t = FK \times \sum_{i=\alpha}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan:

HLS_{α}^t : Harapan Lama Sekolah pada umur α di tahun t

E_i^t : Jumlah penduduk umur i yang bersekolah pada tahun t

P_i^t : Jumlah penduduk umur i pada tahun t

i : Umur ($\alpha, \alpha + 1, \dots, n$)

FK : Faktor koreksi pesantren

Faktor koreksi pesantren dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$FK = \frac{\text{Jumlah santri sekolah dan mukim}}{\text{Jumlah penduduk usia tujuh tahun ke atas}} + 1$$

Keterangan:

- Jumlah santri sekolah dan mukim = rasio santri mukim dikalikan dengan jumlah santri sekolah
- Rasio santri mukim = jumlah santri bermukim dibagi dengan jumlah santri seluruhnya

Manfaat:

Untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Rasio Murid-Guru adalah rata-rata jumlah murid/siswa per guru di tingkat pendidikan tertentu pada tahun ajaran tertentu.

Rumus:

$$\text{Rasio}(M - G)_h^t = \frac{M_h^t}{G_h^t}$$

Keterangan:

$\text{Rasio}(M - G)_h^t$: Rasio murid-guru di tingkat pendidikan h pada tahun ajaran t

- M_h^t : Jumlah murid/siswa yang terdaftar di tingkat pendidikan h pada tahun ajaran t
- G_h^t : Jumlah guru yang terdaftar di tingkat pendidikan h pada tahun ajaran t

Manfaat:

Untuk menggambarkan beban kerja seorang guru dalam mengajar dan untuk melihat mutu pengajaran di kelas.

<https://wakatobikab.bps.go.id>

Kondisi Pendidikan Kabupaten Wakatobi Tahun 2016

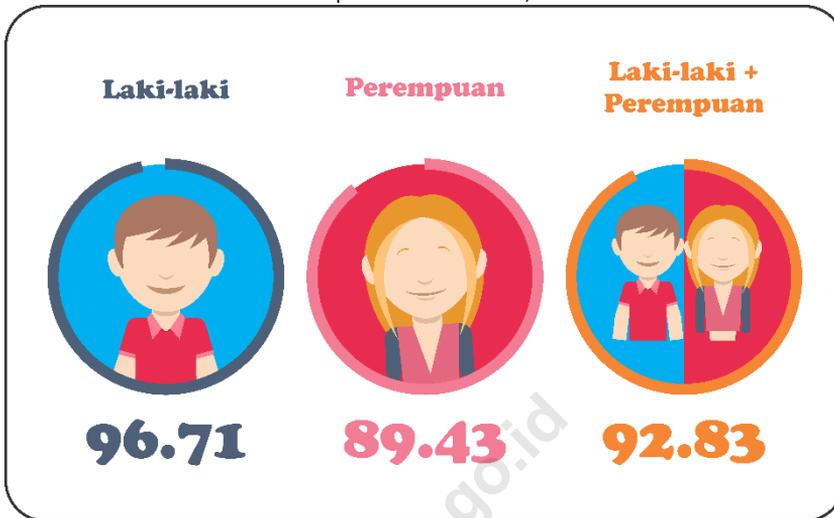
3.1 Angka Melek Huruf

Seseorang dikatakan melek huruf apabila paling tidak orang tersebut dapat menggunakan kemampuan baca dan tulis dan memungkinkannya untuk melanjutkan pemanfaatan kecakapan membaca dan menulis untuk pengembangan diri dan masyarakat. Melek huruf sangat berkaitan erat dengan buta huruf. Semakin meningkatnya angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. Angka melek huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf.

Program pemberantasan buta huruf sebetulnya sudah berjalan sejak zaman kemerdekaan, namun dalam perjalanannya terjadi pasang surut, bahkan dalam sejarahnya Indonesia pernah memproklamkan bebas buta huruf. Tetapi karena tidak dipergunakan keterampilan tersebut menyebabkan banyak yang menjadi buta huruf kembali. Program pemberantasan buta huruf mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung serta berketerampilan. Dengan kemampuan yang dimiliki tersebut memungkinkan seorang dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tujuan lain adalah menciptakan tenaga lokal yang potensial guna mengelola sumber daya yang ada di lingkungannya. Bagi pendidikan persekolahan, diharapkan akan mampu menekan angka putus sekolah di pendidikan persekolahan.

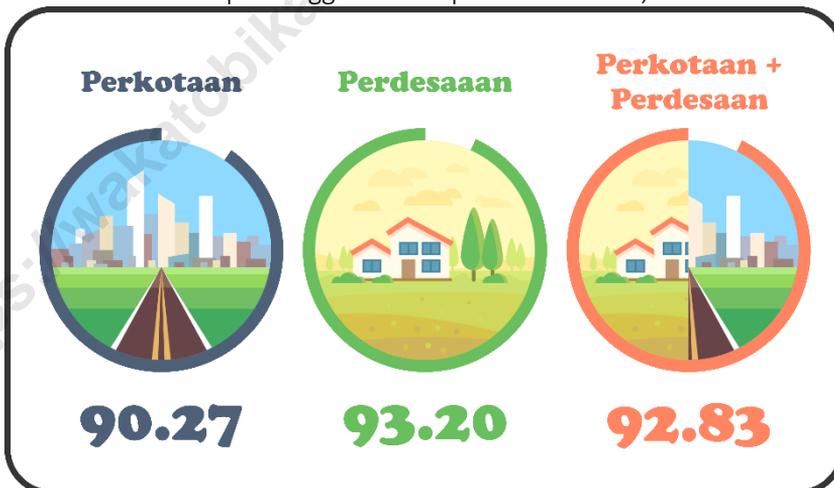
Pada tahun 2016, terjadi peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) penduduk umur 15 tahun ke atas di Kabupaten Wakatobi bila dibandingkan dengan tahun 2015. AMH meningkat dari 90.22 persen menjadi 92.83 persen. Berdasarkan jenis kelamin, AMH penduduk laki-laki (96.71 persen) lebih tinggi daripada penduduk perempuan (89.43 persen). Sementara itu, jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, AMH penduduk berumur 15 tahun ke atas di perdesaan (93.20 persen) menunjukkan nilai lebih tinggi dari AMH di perkotaan (90.27 persen) seperti ditampilkan pada Grafik 2. Dari pencapaian AMH tersebut baik di perkotaan maupun di perdesaan menunjukkan bahwa angka buta huruf tercatat sudah di bawah 10 persen. Namun demikian, pemerintah tetap akan terus menggalakkan pemberantasan buta huruf di seluruh wilayah.

Grafik 1. Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Dirinci Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi, 2016



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016, diolah

Grafik 2. Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Dirinci Menurut Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Wakatobi, 2016

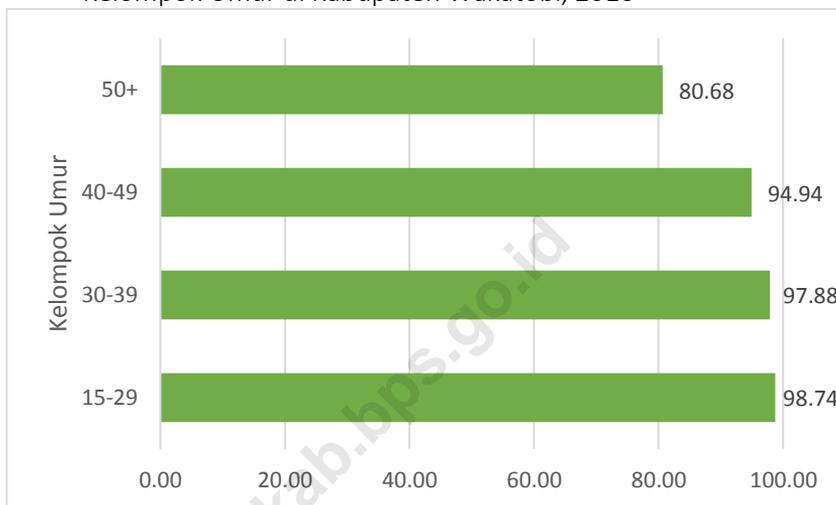


Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016, diolah

Jika ditinjau menurut kelompok umur seperti ditampilkan pada grafik 3, maka dapat dilihat bahwa buta huruf sebagian besar terjadi pada kelompok umur tua. AMH terbesar terdapat pada kelompok umur 15-29 tahun yaitu sebesar 98.74 persen. Pada kelompok umur 40-49 tahun, AMH mencapai 94.94 persen, lebih rendah dibandingkan kelompok umur 30-39 tahun yaitu sebesar 97.88 persen. Bahkan pada kelompok umur 50 tahun ke atas AMH menjadi semakin

rendah yakni 80.68 persen. Memang tidak mudah untuk menerapkan program pemberantasan buta huruf terhadap penduduk yang sudah berumur, diperlukan kesadaran dan peran aktif dari yang bersangkutan untuk mengikuti program keaksaraan fungsional yang terus dikembangkan oleh pemerintah.

Grafik 3. Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Dirinci Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Wakatobi, 2016



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016, diolah

3.2 Pendidikan Anak Usia Dini

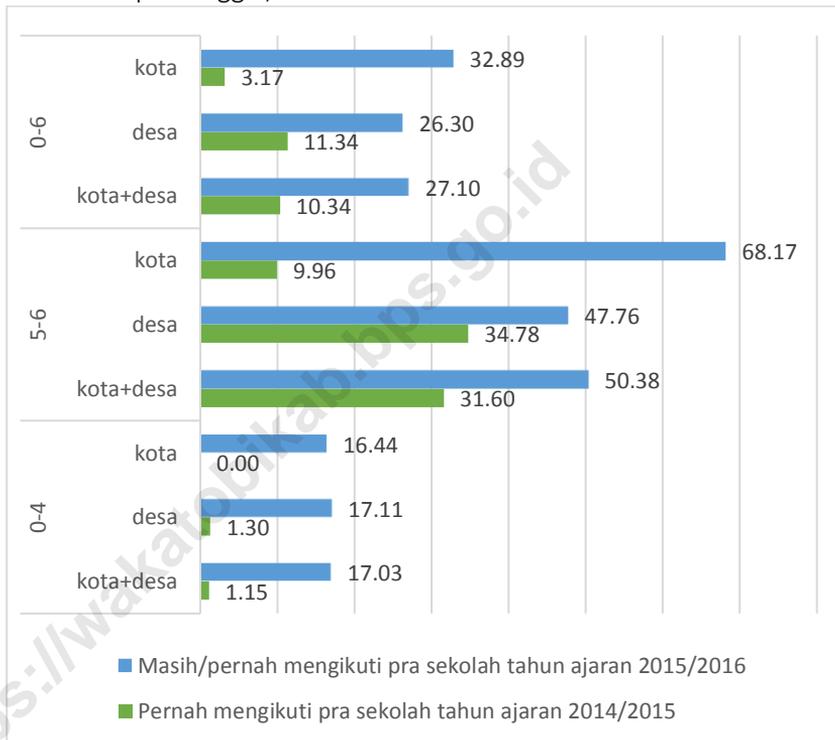
Aset yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa adalah pendidikan, sehingga setiap warga wajib mengikuti pendidikan, baik pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Tidak sedikit penduduk yang masih mengabaikan pendidikan anak usia dini, padahal untuk membiasakan diri dan mengembangkan pola pikir anak pendidikan sejak usia dini mutlak diperlukan.

Tiga tahun pertama anak adalah periode emas anak untuk menyerap informasi sebanyak-banyaknya, sehingga pendidikan usia dini adalah sangat penting. Berdasarkan hasil penelitian, sekitar 50 persen kecerdasan orang dewasa telah terjadi ketika anak berumur 4 tahun. Sehingga periode ini merupakan periode kritis, dimana perkembangan yang diperoleh pada periode ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan periode berikutnya hingga masa dewasa. Sementara masa emas ini hanya datang sekali, sehingga apabila terlewatkan berarti habislah peluangnya.

Menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, pasal 1, butir 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan umur enam tahun yang dilakukan melalui rangsangan pendidikan untuk membantu

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini (prasekolah) ini bertujuan untuk mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Grafik 4. Persentase Anak Umur 0-6 Tahun yang Sedang dan Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah Dirinci Menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal, 2016



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016, diolah

Pada tahun 2016, dari total penduduk Kabupaten Wakatobi umur 0-6 tahun, 27.10 persen masih/pernah mengikuti pendidikan prasekolah tahun ajaran 2015/2016, sedangkan 10.34 persen pernah mengikuti pendidikan pra sekolah tahun ajaran 2014/2015. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, maka persentase anak usia dini di perkotaan yang sedang/pernah mengikuti pendidikan prasekolah tahun ajaran 2015/2016 lebih tinggi persentasenya daripada perdesaan yaitu sebesar 32.89 persen dibanding 26.30 persen. Kemudian jika dilihat lebih jauh berdasarkan kelompok umur dan daerah tempat tinggal, maka anak umur 5-6 tahun yang tinggal baik di perkotaan maupun perdesaan pada umumnya masih/pernah mengikuti pendidikan prasekolah tahun

ajaran 2015/2016 (Grafik 4), dimana yang masih/pernah mengikuti pendidikan tersebut di perkotaan mencapai 68.17 persen, angka ini lebih tinggi dibandingkan anak umur 5-6 tahun yang tinggal di perdesaan (47.76 persen).

Sementara itu, di kelompok umur yang lebih muda, hanya 16.44 persen anak umur 0-4 tahun yang tinggal di perkotaan yang sedang/pernah mengikuti pendidikan prasekolah tahun ajaran 2015/2016, sedangkan di perdesaan mencapai 17.11 persen. Hal tersebut diduga disebabkan karena luasnya daerah perdesaan di Kabupaten Wakatobi sehingga di daerah perdesaan tersedia lebih banyak fasilitas pendidikan prasekolah, di samping kesadaran orang tua yang tinggi mengenai pentingnya pendidikan pra sekolah di masa keemasan anak (*golden age*).

Secara total di Kabupaten Wakatobi, dari seluruh anak di usia kritis (0-4 tahun) yang sedang mengikuti pendidikan prasekolah baru mencapai 17.03 persen, artinya peluang untuk memanfaatkan periode kritis hanya dirasakan kurang dari seperlima anak umur kritis di Kabupaten Wakatobi. Minimnya pengetahuan orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini, di samping faktor ekonomi diduga menjadi penyebab rendahnya persentase tersebut. Oleh karena itu, sosialisasi informasi tentang manfaat pendidikan usia dini perlu lebih digencarkan.

3.3 Rasio Murid-Guru

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pendidik yang memadai merupakan salah satu syarat untuk meningkatkan pelayanan dan mutu pendidikan. Pada tahun ajaran 2015/2016 sarana dan prasarana pendidikan baik swasta maupun negeri di Kabupaten Wakatobi terlihat cukup memadai. Tercatat fasilitas pendidikan prasekolah (TK/RA) berjumlah 158 unit yang tersebar di seluruh kecamatan dengan jumlah peserta didik mencapai 5580 murid. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 4385 murid dengan jumlah TK sebanyak 141 unit. Dengan jumlah tenaga pengajar taman kanak-kanak sebanyak 649 orang, maka secara rata-rata 1 orang guru mengajar 8 hingga 9 anak. Seluruh pendidikan prasekolah ini adalah TK Swasta yang pengelolaannya di bawah yayasan atau kelompok tertentu, dan tidak terdapat TK yang dikelola pemerintah dan berstatus negeri. Hal ini menunjukkan kepekaan sebagian masyarakat tertentu terhadap pendidikan anak usia dini, sehingga diharapkan masyarakat dari berbagai golongan turut berperan aktif dalam pengembangan kecerdasan anak.

Untuk tingkat sekolah dasar negeri maupun swasta baik yang dikelola oleh Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama tercatat 117 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 1197 orang. Dengan jumlah murid 13539, maka rasio murid-guru pada tahun ajaran 2015/2016 adalah 11.31 orang. Dengan kata lain secara rata-rata satu orang guru mempunyai beban mengajar sebanyak kurang lebih 11 sampai 12 orang murid.

Tabel 1. Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru Dirinci Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Wakatobi, 2016

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
(1)	(2)	(3)	(4)
TK	158	5580	649
Negeri	0	0	0
Swasta	145	5238	586
RA/BA	13	342	63
SD Sederajat	117	13539	1197
Negeri	110	12 820	1124
Swasta	7	719	73
SMP Sederajat	54	6688	770
Negeri	44	6098	664
Swasta	10	590	106
SMA Sederajat	30	5878	647
Negeri	20	5145	512
Swasta	10	733	135

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi

Pada jenjang pendidikan menengah pertama (SMP) sederajat, terdapat 54 sekolah. Dari jumlah tersebut, 11 sekolah atau 20 persen diantaranya berada di bawah Kementerian Agama yang biasa disebut sebagai Madrasah Tsanawiyah (MTs). Sekitar 20.95 persen dari total siswa yang duduk di SMP/Sederajat mengenyam pendidikan di MTs. Tercatat dari 6688 siswa di SMP/ sederajat, sebanyak 1401 siswa diantaranya adalah siswa MTs baik negeri maupun swasta. Cukup besarnya minat siswa untuk belajar pada jenjang ini juga didukung oleh tenaga pengajar yang memadai. Dari total 770 guru untuk jenjang pendidikan ini, sebanyak 197 guru atau sebesar 25.58 persennya mengajar di Madrasah Tsanawiyah. Dari jumlah ini dapat dihitung angka rasio murid-guru, dimana secara rata-rata rasio murid-guru untuk jenjang pendidikan SMP/ sederajat adalah 8.69 atau rata-rata satu orang guru mempunyai beban mengajar sebanyak kurang lebih 8 sampai 9 orang murid. Kecilnya angka rasio murid-guru ini diharapkan dapat menjadi pendorong kegiatan belajar agar lebih efektif karena beban mengajar guru yang semakin kecil sehingga interaksi antar siswa dan pengajar dapat berlangsung maksimal.

Pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi fasilitas pendidikan menurun jumlahnya. Pada tahun ajaran 2015/2016 terdapat 30 sekolah setingkat SMA negeri maupun swasta. Dari keseluruhan jumlah tersebut 5 (2 negeri, 3 swasta) diantaranya merupakan Sekolah Menengah Kejuruan. SMK Negeri terdapat di

Kecamatan Kaledupa Selatan dan Wangi-wangi, sedangkan SMK swasta terdapat di Kecamatan Wangi-wangi, Wangi-wangi Selatan, dan Tomia. Sementara 6 sekolah berada di bawah pengelolaan Kementerian Agama. Dari total 5878 siswa yang tercatat menempuh jalur pendidikan SMA sederajat, sebanyak 469 siswa atau 7.98 persen diantaranya bersekolah di SMK. Rata-rata beban sekolah untuk tingkat pendidikan ini adalah 195 sampai 196 murid untuk satu sekolah, dan 9 sampai 10 murid untuk satu guru.

Tabel 2. Rasio Murid-Sekolah dan Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Wakatobi, 2016

Jenjang Pendidikan	Rasio Murid-Sekolah	Rasio Murid-Guru
(1)	(2)	(3)
TK Sederajat	35.32	8.60
SD Sederajat	115.72	11.31
SMP Sederajat	123.85	8.69
SMA Sederajat	195.93	9.09

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi, diolah

Rasio murid-sekolah di atas menunjukkan kemampuan sekolah menampung murid. Sedangkan rasio murid-guru menunjukkan beban kerja guru dalam mengajar. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat tingkat mutu pengajaran di kelas karena semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin kurang tingkat pengawasan atau perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.

Jika melihat kondisi di atas secara umum ketersediaan sekolah dan rasio murid-guru di Kabupaten Wakatobi sudah cukup baik, namun jika dilihat dalam ruang lingkup lebih kecil yakni per kecamatan nampaknya penyebaran sekolah dan guru-guru ini belum begitu merata utamanya untuk tingkat pendidikan di atas pendidikan dasar di daerah terpencil.

3.4 Partisipasi Sekolah

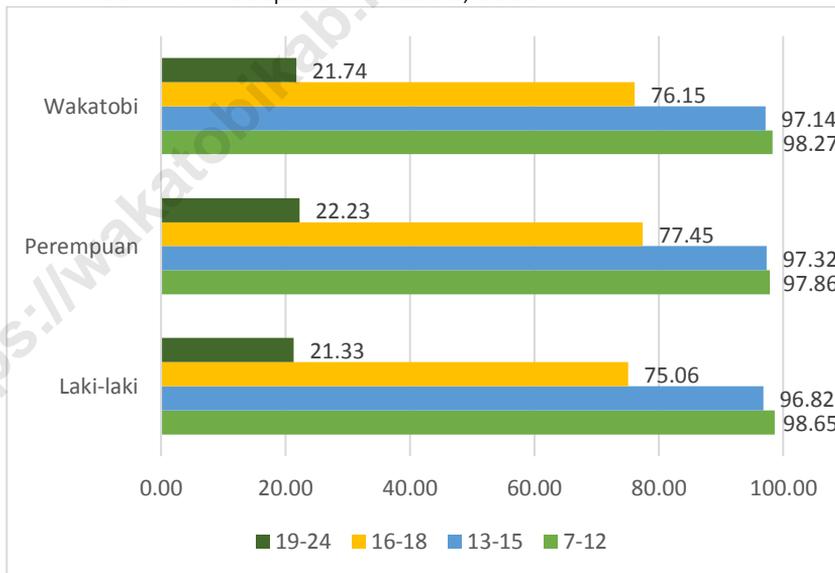
Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk umur sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama umur muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk umur sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah

sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Indikator angka partisipasi sekolah dapat digunakan untuk mengukur proporsi keikutsertaan anak pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ini memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu.

Pembangunan di bidang pendidikan bertujuan meningkatkan akses penduduk pada fasilitas pendidikan, sehingga diharapkan makin banyak penduduk yang dapat bersekolah. Pembangunan pendidikan di Kabupaten Wakatobi telah menunjukkan keberhasilan yang cukup besar. Wajib Belajar 6 tahun yang didukung pembangunan infrastruktur sekolah dan diteruskan dengan Wajib Belajar 9 tahun adalah program sektor pendidikan yang diakui cukup sukses dimana standar program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD lebih dari 95 persen dan APS SMP lebih dari 70 persen.

Grafik 5. Angka Partisipasi Sekolah Dirinci Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi, 2016



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016, diolah

Grafik 5 memperlihatkan pada tahun 2016, di Kabupaten Wakatobi APS umur 7-12 tahun mencapai 98.27 persen dan APS umur 13-15 tahun mencapai 97.14 persen. Meskipun demikian, tidak semua penduduk kelompok umur 7-12, 13-15, dan 16-18 tahun masih bersekolah. Selain itu, juga terlihat semakin tinggi kelompok umur tersebut semakin kecil persentase mereka yang bersekolah.

Angka partisipasi sekolah di rentang umur 16-18 tahun hanya sebesar 76.15 persen. Artinya, hanya terdapat 76-77 dari 100 anak umur 16 hingga 18 tahun yang menempuh jenjang pendidikan.

Angka partisipasi sekolah penduduk umur 16-18 tahun menjadi titik kritis, karena umumnya pada umur menjelang dewasa tekanan psikologis lebih banyak. Pengendalian anak oleh pada orang tua sangat diperlukan agar anak-anak mereka tetap fokus pada kewajiban bersekolah, tidak terpengaruh oleh godaan mencari pendapatan (bekerja), berumah tangga dan sebagainya. Namun, kepedulian orang tua dan para pendidik dalam masa kritis ini harus diakui akan sangat ditentukan oleh cara pandang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Hal ini perlu ditinjau lebih jauh mengapa mereka tidak bersekolah lagi terutama untuk kelompok umur 7-15 tahun dalam rangka menyukseskan Program Wajib Belajar 9 Tahun.

Maju mundurnya pendidikan merupakan tanggung jawab semua pihak. Pendidikan merupakan kegiatan bersama yang melibatkan banyak unsur, mulai siswa itu sendiri, masyarakat, orang tua, pendidik, sarana dan prasarana, manajemen dan biaya pendidikan, proses belajar mengajar, hingga campur tangan pemerintah. Jadi tanggung jawab pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru atau sekolah atau kementerian pendidikan saja, melainkan semua pihak harus terlibat dalam memajukan dunia pendidikan.

Umumnya, terdapat dua ukuran partisipasi sekolah yang utama, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Keduanya mengukur penyerapan penduduk umur sekolah oleh sektor pendidikan. Perbedaan di antara keduanya adalah penggunaan kelompok umur “standar” di setiap jenjang pendidikan. Umur standar yang dimaksud adalah rentang umur yang dianjurkan pemerintah dan umum dipakai untuk setiap jenjang pendidikan, yang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3. Umur Standar di Setiap Jenjang Pendidikan

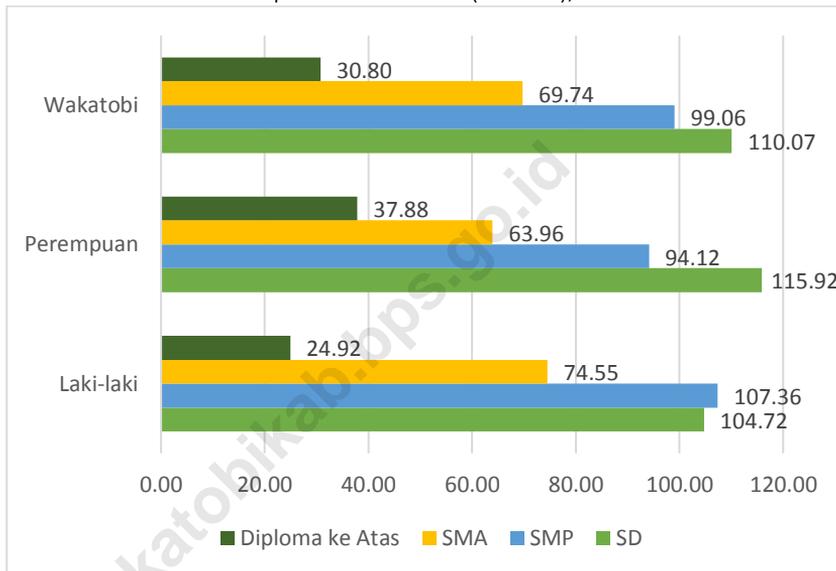
Jenjang Pendidikan	Kelompok Umur (Tahun)
(1)	(2)
SD	7-12
SMP	13-15
SMA	16-18
Perguruan Tinggi	19-24

Sumber: Statistik Indonesia, 2010

APK digunakan untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat batasan umur terhadap jumlah anak dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Grafik 6 menunjukkan pada tahun 2016 APK SD mencapai 110.07. Artinya pada tingkat

sekolah dasar terdapat 110.07 persen penduduk yang bersekolah. Ini berarti bahwa jumlah murid sekolah pada jenjang sekolah dasar lebih besar daripada jumlah penduduk 7-12 tahun atau ada sekitar 10.07 persen penduduk di luar umur SD (7-12 tahun) yang bersekolah di SD. APK penduduk Kabupaten Wakatobi menurun untuk tingkat pendidikan SMP dan jenjang SMA. Pada jenjang SMP, APK menjadi 99.06, sedangkan pada jenjang SMA APK mencapai 69.74.

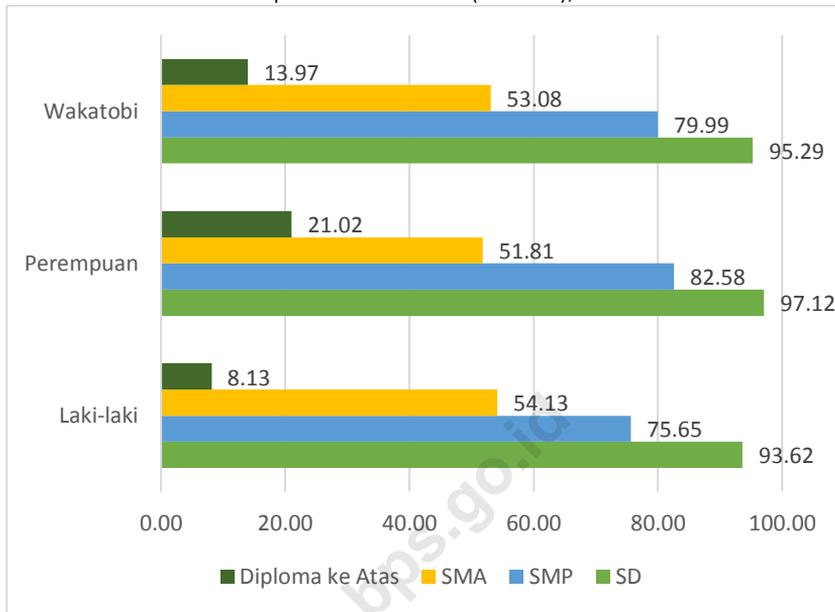
Grafik 6. Angka Partisipasi Kasar Dirinci Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2016



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016, diolah

Sama halnya dengan APK, Angka Partisipasi Murni (APM) juga cenderung menurun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi (Grafik 7). APM menunjukkan proporsi anak sekolah pada kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Pada APM umur anak sekolah di setiap jenjang pendidikan sangat diperhatikan. Hal ini dimaksudkan untuk mengungkapkan banyaknya anak yang sekolah di luar sistem pendidikan, seperti menunda saat mulai bersekolah, murid tidak naik kelas, berhenti/keluar dari sekolah untuk sementara waktu dan lulus lebih awal.

Grafik 7. Angka Partisipasi Murni Dirinci Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2016



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016, diolah

Untuk jenjang SD (7-12 tahun) terlihat bahwa APK mencapai 110.07 persen sementara APM 95.29 persen. Selisih 14.78 persen memiliki arti bahwa di antara murid SD/ sederajat sebanyak 14.78 persen berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun. APM SMP pada 2016 mencapai angka 79.99 persen sedangkan APK-nya mencapai 99.06 persen. Ini artinya hanya 79.99 persen penduduk umur 13-15 tahun yang terserap sebagai siswa SMP, sisanya bisa terserap pada jenjang pendidikan SD, SMA, atau bahkan tidak bersekolah lagi. Selisih 19.07 persen dapat diartikan sebagai jumlah murid SMP yang umurnya berada di luar rentang 13-15 tahun. Begitu pula untuk jenjang SMA (16-18 tahun), terdapat selisih yang cukup besar, sekitar 16.66 persen siswa SMA yang berumur di atas 18 tahun atau di bawah 15 tahun. Hal ini dimungkinkan karena banyak anak yang bersekolah lebih dini dari anak lain, atau sebaliknya.

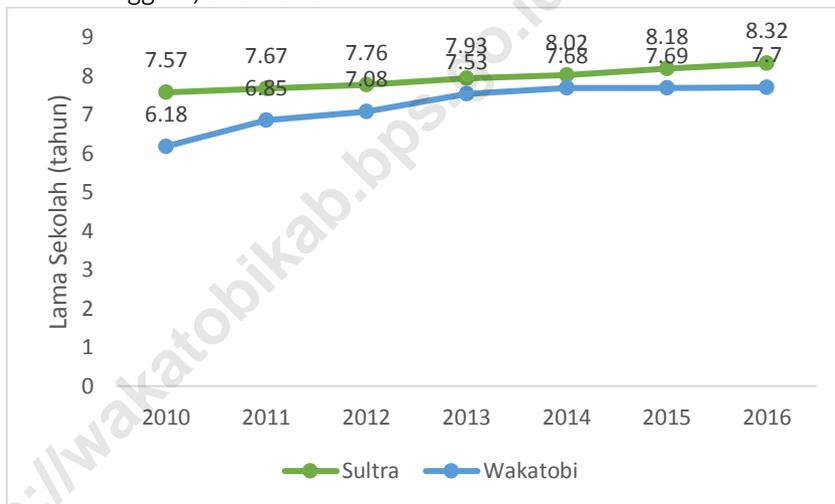
3.5 Rata-rata Lama Sekolah

Secara umum, pencapaian pendidikan penduduk dapat dilihat dari rata-rata lama bersekolah. Indikator ini dapat menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa penduduk di suatu wilayah dapat menikmati pendidikan. Semakin lama sekolah yang dilalui diharapkan semakin bagus kualitas dan keterampilan yang dimiliki. Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu komponen dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index-HDI) dan maksimum lama sekolah yang harus dicapai adalah 15 tahun – ditetapkan

oleh UNDP – atau paling tidak penduduk telah menamatkan suatu jenjang akademi.

Indikator rata-rata lama sekolah (Mean Years of Schooling/MYS) merupakan jumlah tahun yang digunakan penduduk umur 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir dan asumsi dalam keadaan normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. MYS dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan, yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Dari penghitungan dengan menggunakan pola hubungan antar variabel-variabel tersebut akan diperoleh data lama sekolah masing-masing individu.

Grafik 8. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Wakatobi dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2010-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Wakatobi dari tahun 2010 sampai tahun 2016 terus mengalami peningkatan. Tahun 2010 hingga 2011, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Wakatobi masih berada di bawah 7 tahun, yakni 6.18 tahun dan meningkat menjadi 6.85 pada tahun 2011, kemudian terus meningkat setiap tahunnya menjadi 7.7 di tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016, rata-rata penduduk 25 tahun ke atas mengenyam bangku sekolah selama 7.7 tahun. Artinya rata-rata penduduk Kabupaten Wakatobi baru dapat menjalani pendidikannya sampai kelas 1 SMP atau putus sekolah pada kelas 2 SMP. Kondisi ini menggambarkan program wajib belajar sembilan tahun belum membuahkan hasil yang maksimal.

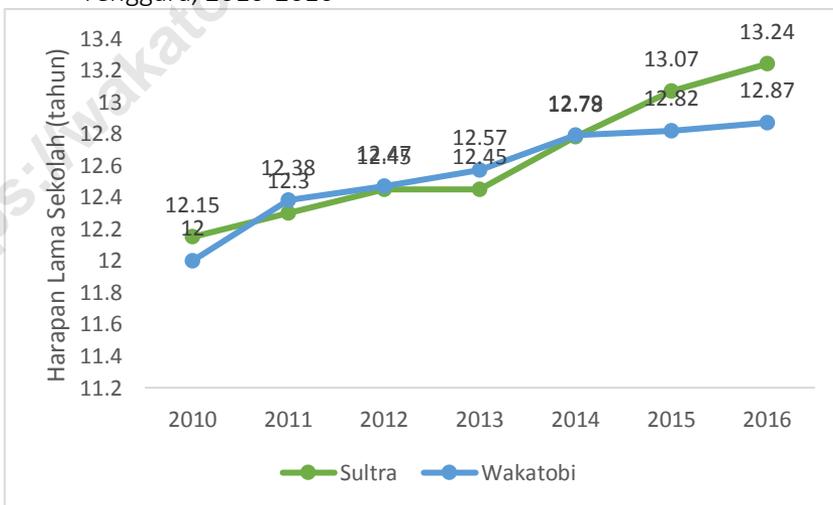
Rata-rata lama sekolah Kabupaten Wakatobi masih berada di bawah rata-rata lama sekolah Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana selama lima tahun terakhir keduanya menunjukkan tren yang sama-sama meningkat.

3.6 Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (Expected Years of Schooling/EYS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. EYS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. EYS dihitung pada umur 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, EYS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren.

Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Wakatobi dari tahun 2010 sampai tahun 2016 terus mengalami peningkatan. Tahun 2010, rata-rata harapan lama sekolah adalah 12 tahun dan meningkat menjadi 12.87 tahun pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016 harapan penduduk Kabupaten Wakatobi yang berumur 7 tahun ke atas mengenyam bangku sekolah selama 12.87 tahun, artinya rata-rata penduduk Kabupaten Wakatobi mempunyai harapan berpendidikan sampai dengan jenjang pendidikan tamat SMA atau sederajat.

Grafik 9. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Wakatobi dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2010-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Hal ini menjadi tantangan bagi semua pihak yang terkait agar dapat mewujudkan harapan lama sekolah tersebut. Terkait dengan angka partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Wakatobi di tahun 2016 yang cenderung menurun

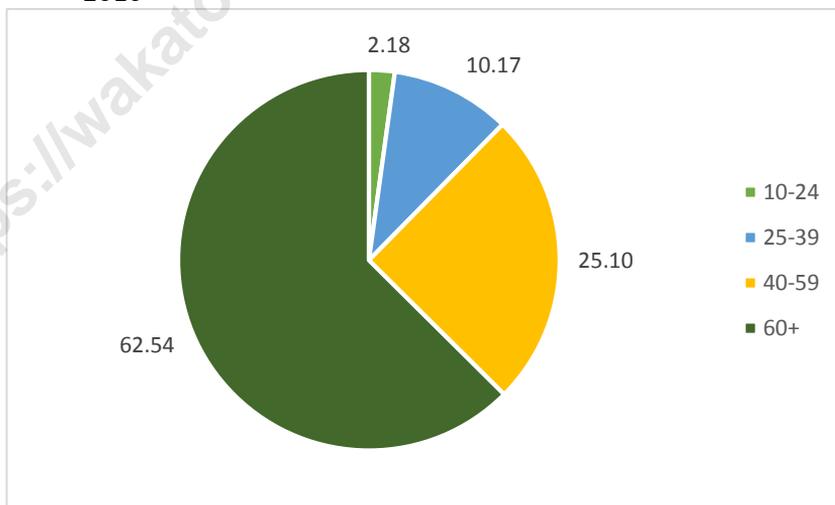
seiring dengan kenaikan jenjang pendidikan, perlu dipikirkan bagaimana cara mempertahankan anak yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas agar dapat menamatkan pendidikannya bahkan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Bila dibandingkan dengan harapan lama sekolah Provinsi Sulawesi Tenggara, selama tahun 2010 hingga 2016, rata-rata harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Wakatobi masih di bawah harapan lama sekolah penduduk se-Provinsi Sulawesi Tenggara. Meskipun sama-sama menunjukkan pola yang meningkat setiap tahunnya, harapan lama sekolah Kabupaten Wakatobi dan Provinsi Sulawesi Tenggara masih jauh bila dibandingkan dengan batas maksimum EYS ketentuan UNDP (18 tahun).

3.7 Tingkat Pendidikan

Selain rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan juga merupakan salah satu indikator penting yang dapat mencerminkan keberhasilan dalam pembangunan pendidikan dan juga merupakan gambaran tentang kualitas suatu penduduk. Semakin banyak persentase penduduk yang mempunyai pendidikan tinggi memperbesar peluang semakin baik kualitas SDM-nya.

Grafik 10. Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Tidak/Belum Pernah Bersekolah Dirinci Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2016



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016, diolah

Dari segi tingkat pendidikan dan status bersekolah, terlihat bahwa persentase penduduk 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah mengenyam bangku pendidikan relatif rendah, yakni sebesar 6.21 persen. Jika dilihat lebih

jauh menurut kelompok umur (Grafik 10), maka dari seluruh penduduk 10 tahun ke atas yang tidak pernah sekolah, ternyata sebagian besar adalah penduduk umur 60 tahun ke atas yaitu sebesar 62.54 persen, 25.10 persen pada umur 40-59 tahun, 10.17 persen pada umur 25-39 tahun, dan 2.18 persen pada umur 10-24 tahun. Hal ini dikarenakan akses pendidikan pada beberapa puluh tahun silam masih sulit dan pada masa itu sebagian masyarakat belum menyadari pentingnya pendidikan bagi kehidupan.

Sementara itu masih terlihat kesenjangan antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan, dimana proporsi penduduk perempuan yang tidak pernah sekolah jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki (Tabel 4).

Tabel 4. Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Dirinci Menurut Status Bersekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2016

Status Bersekolah	Laki-laki	Perempuan	Wakatobi
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Bersekolah	1.61	4.60	6.21
Masih Bersekolah	12.67	12.55	25.21
- SD Sederajat	5.17	4.37	9.54
- SMP Sederajat	2.82	4.16	6.98
- SMA Sederajat	3.41	2.43	5.84
- Diploma ke Atas	1.26	1.59	2.85
Tidak Bersekolah Lagi	33.05	35.52	68.58

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016, diolah

Pada Tabel 5, penduduk Kabupaten Wakatobi berumur 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah bersekolah adalah sekitar 6.21 persen dan yang tidak/belum menamatkan pendidikannya di bangku Sekolah Dasar relatif besar yaitu 20.51 persen. Sementara yang berhasil menamatkan pendidikannya sampai SD mencapai 35.63 persen. Itu artinya sekitar 6.21 persen penduduk Kabupaten Wakatobi belum optimal merasakan manfaat pembangunan di bidang pendidikan seperti yang dicanangkan pemerintah pada Program Wajib Belajar 9 Tahun. Proporsi ini bahkan semakin menurun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Masih sedikit penduduk yang mampu menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikan diploma ke atas, yaitu hanya sekitar 8.99 persen.

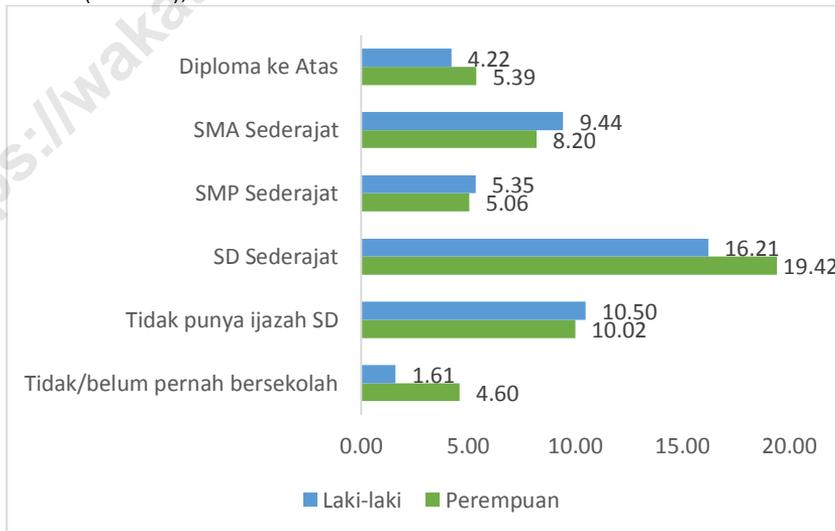
Tabel 5. Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas Dirinci Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2016

Status Bersekolah	Laki-laki	Perempuan	Wakatobi
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Bersekolah	1.61	4.60	6.21
Tidak/Belum Tamat SD	10.50	10.02	20.51
SD Sederajat	16.21	19.42	35.63
SMP Sederajat	5.35	5.06	10.41
SMA Sederajat	9.44	8.20	17.64
Diploma ke Atas	4.22	5.39	9.61

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016, diolah

Dilihat dari sisi jenis kelamin, Grafik 11 memperlihatkan bahwa pada jenjang SD sederajat dan diploma ke atas proporsi penduduk perempuan yang berijazah cenderung lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki sedangkan pada jenjang SMP sederajat dan SMA sederajat proporsi penduduk laki-laki yang berijazah cenderung lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan.

Grafik 11. Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas Dirinci Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2016



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016, diolah

3.8 Akses Teknologi Informasi

Faktor lain yang turut mempengaruhi kualitas pendidikan adalah akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Jika dimanfaatkan dengan baik maka TIK bisa berperan positif terhadap kemajuan pendidikan. Dengan hadirnya TIK, orang-orang yang tersebar di berbagai tempat bisa saling bertukar informasi atau berinteraksi dengan cepat dan efisien, tidak tergantung pada lokasi mereka ataupun perbedaan bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Sebagai contoh seorang siswa yang tinggal di daerah yang terpencil bisa mengambil informasi atau memperoleh pengetahuan yang sebenarnya terletak ribuan atau bahkan ratusan ribu kilometer darinya.

TIK bisa diakses berbagai sumber diantaranya telepon rumah dan telepon seluler. Perkembangan telepon seluler cenderung berdampak kepada kepemilikan rumah tangga atas telepon biasa atau telepon rumah. Pesatnya perkembangan teknologi telepon seluler membuat telepon rumah semakin ditinggalkan. Hal ini dapat dilihat dari kecilnya persentase kepemilikan telepon rumah dan meningkatnya kepemilikan telepon seluler. Penggunaan telepon rumah yang mengharuskan seseorang berada di posisi tertentu yang terpasang jaringan telepon semakin ditinggalkan masyarakat karena dianggap kurang efisien dalam mendukung mobilitas penggunaannya.

Masyarakat kini cenderung memilih telepon seluler karena praktis, dapat dibawa bepergian kemana-mana, lebih bersifat pribadi, dan tersedianya kecanggihan teknologi dalam telepon seluler yang dapat mengakses internet, menyimpan dan mendengarkan musik, menyimpan gambar (foto) dan video, tersedianya fitur games, serta merekam gambar dan suara, dan lain-lain.

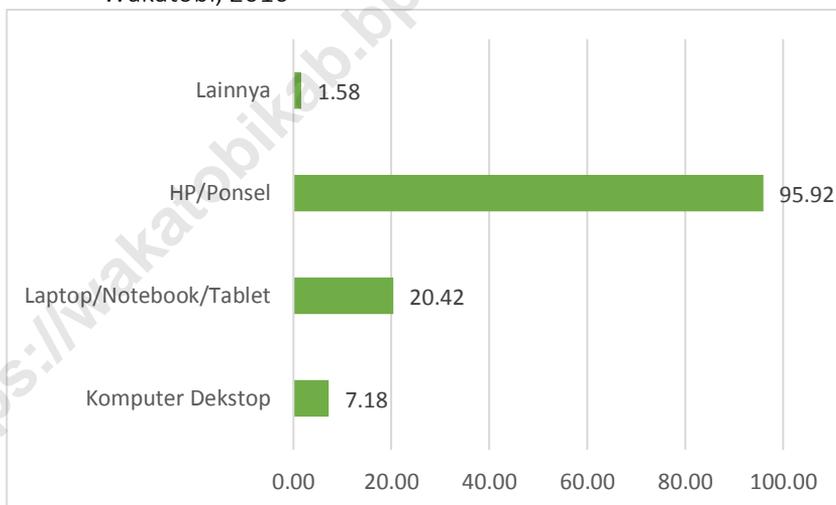
Pada tahun 2016, penggunaan telepon seluler meningkat 1.56 persen dibanding tahun 2015 menjadi 59.24 persen. Pengguna telepon seluler masih didominasi oleh penduduk yang tinggal di perkotaan yaitu sebesar 66.99 persen sedangkan di perdesaan sebesar 58.06 persen. Di perdesaan, peningkatan penggunaan telepon seluler lebih besar dibandingkan di perkotaan, dimana di perdesaan jumlah pengguna telepon seluler naik sebesar 1.59 persen, sedangkan di perdesaan pengguna telepon seluler hanya meningkat 0.25 persen.

Peningkatan pengguna telepon seluler sebanding dengan peningkatan pengguna internet. Media internet digunakan karena memiliki sifat instan, interaktif dan menarik. Pada tahun 2016, secara umum terjadi peningkatan sebesar 3.07 persen terhadap penduduk umur 5 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir dari waktu pencacahan, dari 15.53 persen di tahun sebelumnya menjadi 18.60 persen. Dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, penduduk perdesaan lebih banyak yang memiliki akses internet dibandingkan di perkotaan yaitu sebesar 19.78 persen berbanding 10.85 persen. Potensi pengguna internet yang meningkat ini bisa menjadi motivasi bagi dunia bisnis telekomunikasi untuk memperluas jangkauan akses internet yang masih terbatas untuk beberapa wilayah di Kabupaten Wakatobi.

Penggunaan HP sebagai media akses internet pun mengalami peningkatan. Di tahun 2016, dari seluruh pengguna internet umur 5 tahun ke atas, sekitar 95.92 persen mengakses melalui media HP. Sementara penggunaan internet di sekolah hanya sekitar 30.80 persen. Angka ini masih relatif rendah jika dibandingkan dengan banyaknya penduduk umur 5 tahun ke atas yang berstatus masih bersekolah yang mencapai 25.21 persen. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana akses internet di dunia pendidikan memegang peranan penting untuk peningkatan akses TIK (multimedia). Ditinjau menurut tingkat pendidikan, persentase pengguna internet meningkat seiring meningkatnya tingkat pendidikan seperti ditampilkan Grafik 14.

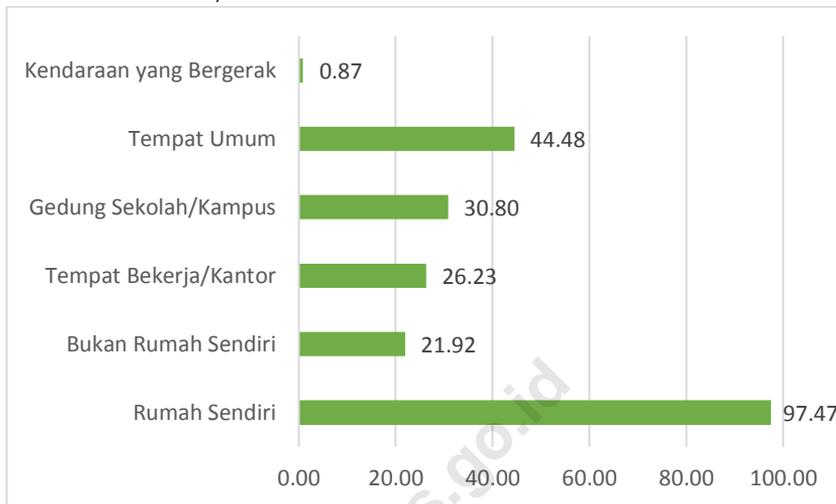
Sementara itu, rumah tangga yang mempunyai akses terhadap komputer/laptop pada tahun 2016 hanya mencapai 19.32 persen. Penggunaan komputer/laptop di daerah perkotaan mencapai 37.42 persen, sedangkan di perdesaan pengguna komputer/laptop hanya berkisar 19 persen.

Grafik 12. Persentase Penduduk Umur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet Dirinci Menurut Media Mengakses Internet di Kabupaten Wakatobi, 2016



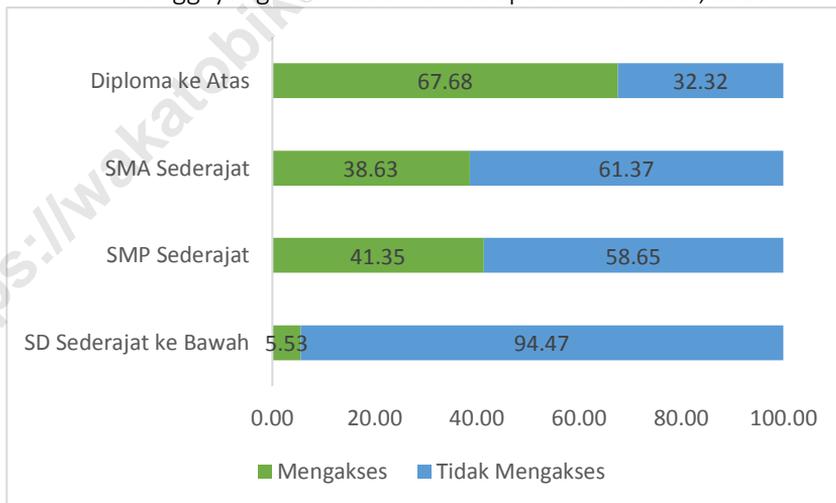
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016, diolah

Grafik 13. Persentase Penduduk Umur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet Dirinci Menurut Lokasi Mengakses Internet di Kabupaten Wakatobi, 2016



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016, diolah

Grafik 14. Persentase Pengguna Internet Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Wakatobi, 2016



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016, diolah

<https://wakatobikab.bps.go.id>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

<https://wakatobikab.bps.go.id>

Tabel L1. Jumlah Sekolah di Lingkungan Depdikbud menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan, 2016

Kecamatan	TK	SD	SMP	SMU/SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Binongko	10	13	3	3
Togo Binongko	5	7	3	1
Tomia	18	10	4	3
Tomia Timur	21	13	5	1
Kaledupa	17	13	5	2
Kaledupa Selatan	21	10	6	3
Wangi-wangi	31	22	8	5
Wangi-wangi Selatan	22	22	9	6
Wakatobi	145	110	43	24

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wakatobi

Tabel L2. Jumlah Murid di Lingkungan Depdikbud menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan, 2016

Kecamatan	TK	SD	SMP	SMU/SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Binongko	392	1236	485	657
Togo Binongko	218	748	307	141
Tomia	543	1005	391	438
Tomia Timur	572	1061	519	477
Kaledupa	619	1195	541	487
Kaledupa Selatan	519	928	557	433
Wangi-wangi	1278	3153	1219	1231
Wangi-wangi Selatan	1097	3241	1268	1107
Wakatobi	5238	12567	5287	4971

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wakatobi

Tabel L3. Jumlah Guru di Lingkungan Depdikbud menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan, 2016

Kecamatan	TK	SD	SMP	SMU/SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Binongko	32	107	47	56
Togo Binongko	19	52	29	10
Tomia	54	84	52	54
Tomia Timur	71	122	65	40
Kaledupa	71	132	64	43
Kaledupa Selatan	90	96	73	44
Wangi-wangi	147	259	133	129
Wangi-wangi Selatan	102	249	110	129
Wakatobi	586	1101	573	505

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wakatobi

Tabel L4. Jumlah Sekolah di Luar Lingkungan Depdikbud menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan, 2016

Kecamatan	TK	SD	SMP	SMU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Binongko	0	0	1	0
Togo Binongko	0	0	1	2
Tomia	1	0	1	1
Tomia Timur	1	0	1	0
Kaledupa	1	2	2	0
Kaledupa Selatan	1	0	1	1
Wangi-wangi	5	3	2	1
Wangi-wangi Selatan	4	2	2	1
Wakatobi	13	7	11	6

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi

Tabel L5. Jumlah Murid di Luar Lingkungan Depdikbud menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan, 2016

Kecamatan	TK	SD	SMP	SMU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Binongko	0	0	156	0
Togo Binongko	0	0	66	179
Tomia	16	0	115	58
Tomia Timur	19	0	27	0
Kaledupa	57	192	175	0
Kaledupa Selatan	31	0	23	133
Wangi-wangi	130	263	620	77
Wangi-wangi Selatan	89	517	189	460
Wakatobi	342	972	1371	907

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi

Tabel L6. Jumlah Guru di Luar Lingkungan Depdikbud menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan, 2016

Kecamatan	TK	SD	SMP	SMU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Binongko	0	0	27	0
Togo Binongko	0	0	10	44
Tomia	3	0	21	14
Tomia Timur	3	0	16	0
Kaledupa	5	20	27	0
Kaledupa Selatan	6	0	9	19
Wangi-wangi	23	33	50	22
Wangi-wangi Selatan	23	43	37	43
Wakatobi	63	96	197	142

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi

Tabel L7. Jumlah Sekolah Setingkat Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2016

Kecamatan	Depdikbud			Departemen Lainnya		
	Negeri	Swasta	N + S	Negeri	Swasta	N + S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Binongko	0	10	10	0	0	0
Togo Binongko	0	5	5	0	0	0
Tomia	0	18	18	0	1	1
Tomia Timur	0	21	21	0	1	1
Kaledupa	0	17	17	0	1	1
Kaledupa Selatan	0	21	21	0	1	1
Wangi-wangi	0	31	31	0	5	5
Wangi-wangi Selatan	0	22	22	0	4	4
Wakatobi	0	145	145	0	13	13

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L8.. Jumlah Sekolah Setingkat Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2016

Kecamatan	Depdikbud			Departemen Lainnya		
	Negeri	Swasta	N + S	Negeri	Swasta	N + S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Binongko	13	0	13	0	0	0
Togo Binongko	7	0	7	0	0	0
Tomia	10	0	10	0	0	0
Tomia Timur	13	0	13	0	0	0
Kaledupa	13	0	13	0	2	2
Kaledupa Selatan	10	0	10	0	0	0
Wangi-wangi	22	0	22	0	3	3
Wangi-wangi Selatan	21	1	22	1	1	2
Wakatobi	109	1	110	1	6	7

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L9. Jumlah Sekolah Setingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2016

Kecamatan	Depdikbud			Departemen Lainnya		
	Negeri	Swasta	N + S	Negeri	Swasta	N + S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Binongko	3	0	3	1	0	1
Togo Binongko	3	0	3	0	1	1
Tomia	4	0	4	1	0	1
Tomia Timur	5	0	5	0	1	1
Kaledupa	5	0	5	1	1	2
Kaledupa Selatan	6	0	6	0	1	1
Wangi-wangi	7	1	8	1	1	2
Wangi-wangi Selatan	7	2	9	0	2	2
Wakatobi	40	3	43	4	7	11

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L10. Jumlah Sekolah Setingkat Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2016

Kecamatan	Depdikbud			Departemen Lainnya		
	Negeri	Swasta	N + S	Negeri	Swasta	N + S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Binongko	3	0	3	0	0	0
Togo Binongko	1	0	1	1	1	2
Tomia	2	1	3	0	1	1
Tomia Timur	1	0	1	0	0	0
Kaledupa	1	1	2	0	0	0
Kaledupa Selatan	3	0	3	0	1	1
Wangi-wangi	4	1	5	0	1	1
Wangi-wangi Selatan	3	3	6	1	0	1
Wakatobi	18	6	24	2	4	6

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L11. Jumlah Murid Setingkat Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2016

Kecamatan	Depdikbud			Departemen Lainnya		
	Negeri	Swasta	N + S	Negeri	Swasta	N + S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Binongko	0	392	392	0	0	0
Togo Binongko	0	218	218	0	0	0
Tomia	0	543	543	0	16	16
Tomia Timur	0	572	572	0	19	19
Kaledupa	0	619	619	0	57	57
Kaledupa Selatan	0	519	519	0	31	31
Wangi-wangi	0	1278	1278	0	130	130
Wangi-wangi Selatan	0	1097	1097	0	89	89
Wakatobi	0	5238	5238	0	342	342

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L12. Jumlah Murid Setingkat Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2016

Kecamatan	Depdikbud			Departemen Lainnya		
	Negeri	Swasta	N + S	Negeri	Swasta	N + S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Binongko	1236	0	1236	0	0	0
Togo Binongko	748	0	748	0	0	0
Tomia	1005	0	1005	0	0	0
Tomia Timur	1061	0	1061	0	0	0
Kaledupa	1195	0	1195	0	192	192
Kaledupa Selatan	928	0	928	0	0	0
Wangi-wangi	3153	0	3153	0	263	263
Wangi-wangi Selatan	3136	105	3241	358	159	517
Wakatobi	12462	105	12567	358	614	972

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L13. Jumlah Murid Setingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2016

Kecamatan	Depdikbud			Departemen Lainnya		
	Negeri	Swasta	N + S	Negeri	Swasta	N + S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Binongko	485	0	485	156	0	156
Togo Binongko	307	0	307	0	66	66
Tomia	391	0	391	115	0	115
Tomia Timur	519	0	519	0	27	27
Kaledupa	541	0	541	163	42	205
Kaledupa Selatan	557	0	557	0	23	23
Wangi-wangi	1129	90	1219	565	55	620
Wangi-wangi Selatan	1170	98	1268	0	189	189
Wakatobi	5099	188	5287	999	402	1401

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L14. Jumlah Murid Setingkat Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2016

Kecamatan	Depdikbud			Departemen Lainnya		
	Negeri	Swasta	N + S	Negeri	Swasta	N + S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Binongko	657	0	657	0	0	0
Togo Binongko	141	0	141	100	79	179
Tomia	425	13	438	0	58	58
Tomia Timur	477	0	477	0	0	0
Kaledupa	442	45	487	0	0	0
Kaledupa Selatan	433	0	433	0	133	133
Wangi-wangi	1138	93	1231	0	77	77
Wangi-wangi Selatan	872	235	1107	460	0	460
Wakatobi	4585	386	4971	560	347	907

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L15. Jumlah Guru Setingkat Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2016

Kecamatan	Depdikbud			Departemen Lainnya		
	Negeri	Swasta	N + S	Negeri	Swasta	N + S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Binongko	0	32	32	0	0	0
Togo Binongko	0	19	19	0	0	0
Tomia	0	54	54	0	3	3
Tomia Timur	0	71	71	0	3	3
Kaledupa	0	71	71	0	5	5
Kaledupa Selatan	0	90	90	0	6	6
Wangi-wangi	0	147	147	0	23	23
Wangi-wangi Selatan	0	102	102	0	23	23
Wakatobi	0	586	586	0	63	63

Sumber : Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L16. Jumlah Guru Setingkat Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2016

Kecamatan	Depdikbud			Departemen Lainnya		
	Negeri	Swasta	N + S	Negeri	Swasta	N + S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Binongko	107	0	107	0	0	0
Togo Binongko	52	0	52	0	0	0
Tomia	84	0	84	0	0	0
Tomia Timur	122	0	122	0	0	0
Kaledupa	132	0	132	0	20	20
Kaledupa Selatan	96	0	96	0	0	0
Wangi-wangi	259	0	259	0	33	33
Wangi-wangi Selatan	242	7	249	30	13	43
Wakatobi	1094	7	1101	30	66	96

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L17. Jumlah Guru Setingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2016

Kecamatan	Depdikbud			Departemen Lainnya		
	Negeri	Swasta	N + S	Negeri	Swasta	N + S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Binongko	47	0	47	27	0	27
Togo Binongko	29	0	29	0	10	10
Tomia	52	0	52	21	0	21
Tomia Timur	65	0	65	0	16	16
Kaledupa	64	0	64	21	6	27
Kaledupa Selatan	73	0	73	0	9	9
Wangi-wangi	124	9	133	40	10	50
Wangi-wangi Selatan	101	9	110	0	37	37
Wakatobi	555	18	573	109	88	197

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L18. Jumlah Guru Setingkat Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2016

Kecamatan	Depdikbud			Departemen Lainnya		
	Negeri	Swasta	N + S	Negeri	Swasta	N + S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Binongko	56	0	56	0	0	0
Togo Binongko	10	0	10	26	18	44
Tomia	38	16	54	0	14	14
Tomia Timur	40	0	40	0	0	0
Kaledupa	37	6	43	0	0	0
Kaledupa Selatan	44	0	44	0	19	19
Wangi-wangi	123	6	129	0	22	22
Wangi-wangi Selatan	95	34	129	43	0	43
Wakatobi	443	62	505	69	73	142

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L19. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Binongko, 2016

Departemen	Negeri			Swasta		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Depdikbud						
Taman Kanak-Kanak	0	0	0	10	392	32
Sekolah Dasar	13	1236	107	0	0	0
SLTP	3	485	47	0	0	0
SMU/SMK	3	657	56	0	0	0
Dep. Agama						
Raudatul Athfal	0	0	0	0	0	0
Madrasah Ibtidaiyah	0	0	0	0	0	0
Madrasah Tsanawiyah	1	156	27	0	0	0
Madrasah Aliyah	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L20. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Togo Binongko, 2016

Departemen	Negeri			Swasta		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Depdikbud						
Taman Kanak-Kanak	0	0	0	5	392	32
Sekolah Dasar	7	748	52	0	0	0
SLTP	3	307	29	0	0	0
SMU/SMK	1	141	10	0	0	0
Dep. Agama						
Raudatul Athfal	0	0	0	0	0	0
Madrasah Ibtidaiyah	0	0	0	0	0	0
Madrasah Tsanawiyah	0	0	0	1	66	10
Madrasah Aliyah	1	100	26	1	79	18

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L21. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Tomia, 2016

Departemen	Negeri			Swasta		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Depdikbud						
Taman Kanak-Kanak	0	0	0	18	543	54
Sekolah Dasar	10	1005	84	0	0	0
SLTP	4	391	52	0	0	0
SMU/SMK	2	425	38	1	13	16
Dep. Agama						
Raudatul Athfal	0	0	0	1	16	3
Madrasah Ibtidaiyah	0	0	0	0	0	0
Madrasah Tsanawiyah	1	115	21	0	0	0
Madrasah Aliyah	0	0	0	1	58	14

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L22. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Tomia Timur, 2016

Departemen	Negeri			Swasta		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Depdikbud						
Taman Kanak-Kanak	0	0	0	21	572	71
Sekolah Dasar	13	1061	122	0	0	0
SLTP	5	519	65	0	0	0
SMU/SMK	1	477	40	0	0	0
Dep. Agama						
Raudatul Athfal	0	0	0	1	19	3
Madrasah Ibtidaiyah	0	0	0	0	0	0
Madrasah Tsanawiyah	0	0	0	1	27	16
Madrasah Aliyah	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L23. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Kaledupa, 2016

Departemen	Negeri			Swasta		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Depdikbud						
Taman Kanak-Kanak	0	0	0	17	619	71
Sekolah Dasar	13	1195	132	0	0	0
SLTP	5	541	64	0	0	0
SMU/SMK	1	442	37	1	45	6
Dep. Agama						
Raudatul Athfal	0	0	0	1	57	5
Madrasah Ibtidaiyah	0	0	0	2	192	20
Madrasah Tsanawiyah	1	163	21	1	42	6
Madrasah Aliyah	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L24. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Kaledupa Selatan, 2016

Departemen	Negeri			Swasta		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Depdikbud						
Taman Kanak-Kanak	0	0	0	21	519	90
Sekolah Dasar	10	928	96	0	0	0
SLTP	6	557	73	0	0	0
SMU/SMK	3	433	44	0	0	0
Dep. Agama						
Raudatul Athfal	0	0	0	1	31	6
Madrasah Ibtidaiyah	0	0	0	0	0	0
Madrasah Tsanawiyah	0	0	0	1	23	9
Madrasah Aliyah	0	0	0	1	133	19

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L25. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Wangi-Wangi, 2016

Departemen	Negeri			Swasta		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Depdikbud						
Taman Kanak-Kanak	0	0	0	31	1278	147
Sekolah Dasar	22	3153	259	0	0	0
SLTP	7	1129	124	1	90	9
SMU/SMK	4	1138	123	1	93	6
Dep. Agama						
Raudatul Athfal	0	0	0	5	130	23
Madrasah Ibtidaiyah	0	0	0	3	263	33
Madrasah Tsanawiyah	1	565	40	1	55	10
Madrasah Aliyah	0	0	0	1	77	22

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L26. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 2016

Departemen	Negeri			Swasta		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Depdikbud						
Taman Kanak-Kanak	0	0	0	22	1097	102
Sekolah Dasar	21	3136	242	1	358	30
SLTP	7	1170	101	2	98	9
SMU/SMK	3	872	95	3	235	34
Dep. Agama						
Raudatul Athfal	0	0	0	4	89	23
Madrasah Ibtidaiyah	1	358	30	1	159	13
Madrasah Tsanawiyah	0	0	0	2	189	37
Madrasah Aliyah	1	460	43	0	0	0

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L27. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kabupaten Wakatobi, 2016

Departemen	Negeri			Swasta		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Depdikbud						
Taman Kanak-Kanak	0	0	0	145	5238	586
Sekolah Dasar	109	12462	1094	1	105	7
SLTP	40	5099	555	3	188	18
SMU/SMK	18	4585	443	6	386	62
Dep. Agama						
Raudatul Athfal	0	0	0	13	342	63
Madrasah Ibtidaiyah	1	358	30	6	614	66
Madrasah Tsanawiyah	4	999	109	7	402	88
Madrasah Aliyah	2	560	69	4	347	73

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L28. Jumlah Alumni di Perguruan Tinggi menurut Lembaga Pendidikan di Wakatobi, TA 2016/2017

Lembaga Pendidikan	Semester Ganjil		
	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam	34	61	95
ABA Citra Bahari	10	9	19

Sumber: Perguruan Tinggi se-Wakatobi

Tabel L29. Jumlah Dosen Pengajar pada Perguruan Tinggi menurut Lembaga Pendidikan di Wakatobi, TA 2016/2017

Lembaga Pendidikan	Dosen Tetap	Dosen Tidak Tetap	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam	41	12	53
ABA Citra Bahari	5	4	9

Sumber: Perguruan Tinggi se-Wakatobi

Tabel L30. Jumlah Mahasiswa Terdaftar pada Perguruan Tinggi menurut Lembaga Pendidikan di Wakatobi, TA 2016/2017

Lembaga Pendidikan	Semester Ganjil			Semester Genap		
	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam	195	345	540	193	344	537
ABA Citra Bahari	7	5	12	7	5	12

Sumber: Perguruan Tinggi se-Wakatobi

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WAKATOBI**

Jl. Utudae Samad No. 25, Wakatobi, 93795
Telp/Faks: (0404) 2222003
Homepage: <https://wakatobikab.bps.go.id>
E-mail: bps7407@bps.go.id